

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara maupun daerah. Fenomena ini merepresentasikan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang tercermin pada kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Stephen C. SmithTodaro, (2010) pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, stabilitas pertumbuhan menjadi target fundamental dalam pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan signifikan akibat ketidakstabilan ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19. Data Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa ekonomi Indonesia sempat berkontraksi pada tahun 2020 sebelum akhirnya memasuki fase pemulihan, meski fluktuasi masih terus terjadi. Fenomena tersebut menegaskan bahwa ketahanan ekonomi daerah merupakan pilar krusial bagi pertumbuhan nasional, mengingat pertumbuhan ekonomi pusat merupakan akumulasi dari performa ekonomi di setiap daerah.

Pada tingkat provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Jawa Timur memiliki struktur ekonomi yang cukup kuat dengan sektor industri, perdagangan, pertanian, dan jasa sebagai penyumbang utama PDRB. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur juga mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur (2024), laju pertumbuhan ekonomi

Jawa Timur mengalami perlambatan pada masa pandemi dan mulai meningkat kembali setelah tahun 2021, tetapi belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota sangat berperan dalam menjaga kinerja ekonomi provinsi. Pertumbuhan ekonomi yangiringi dengan pembangunan ekonomi secara terus menerus akan merubah struktur ekonomi (Ranti Safitri & Endang, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, pertumbuhan ekonomi Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro hanya sebesar 1,67 persen, sedangkan jika dilihat tanpa sektor migas pertumbuhan ekonomi mencapai 5,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sektor pertambangan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil ketika produksi migas menurun. pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro tercatat sebesar 5,32 persen, dengan pertumbuhan non-migas sebesar 6,12 persen dan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu komponen yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain sektor pertambangan, faktor konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi lainnya juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2021, ekonomi Kabupaten Bojonegoro bahkan mengalami kontraksi sebesar -5,54 persen akibat penurunan pada beberapa sektor utama, terutama pertambangan dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Bojonegoro masih rentan terhadap perubahan pada sektor tertentu sehingga pertumbuhan ekonomi belum stabil (Bojonegoro, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya dipengaruhi oleh sektor migas,

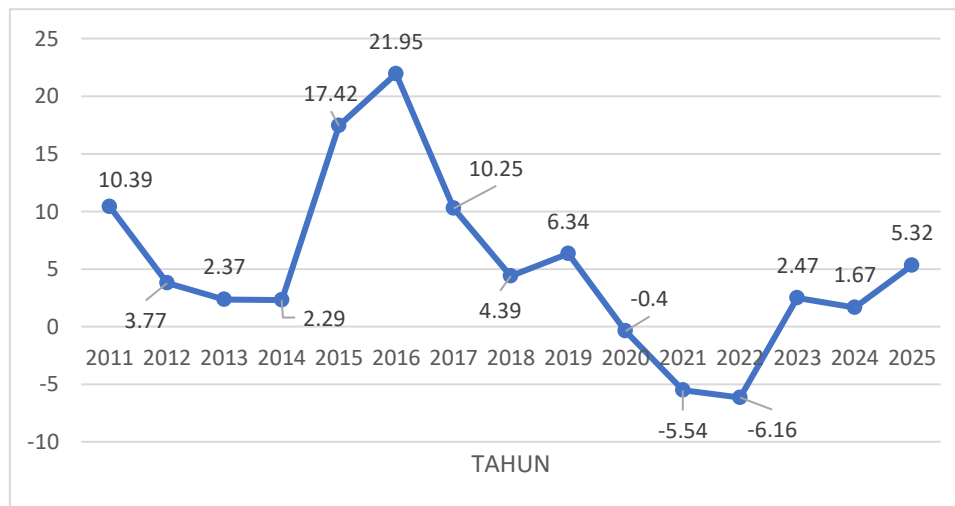
tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah, pengeluaran pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat konsumsi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penting karena menunjukkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Belanja modal diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur yang dapat mendorong aktivitas ekonomi. Human capital melalui Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi produktivitas, sedangkan konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam PDRB dari sisi pengeluaran yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro menjadi penting dilakukan karena adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi serta ketergantungan pada sektor tertentu. Dengan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, human capital, dan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor yang paling berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro, dengan jargon sebagai lumbung pangan dan energi merupakan daerah yang kaya akan bahan mentah yang berasal dari berbagai sektor perkebunan, pertanian, perikanan, serta minyak/gas. Selain itu, jumlah pertumbuhan penduduk juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, di Negara maju pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan penduduk dibarengi dengan tumbuhnya kualitas penduduk, investasi yang tinggi, dan teknologi yang memadai. Namun, apabila sebaliknya dimana tingkat investasi kurang, teknologi

sederhana, tenaga kerja kurang ahli, pertumbuhan penduduk akan menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro (Nafl' & Astuti, 2021). Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini karena besarnya sumber daya migas dapat sebagai pendorong kemajuan perekonomian daerah. Kemajuan perekonomian suatu daerah pada umumnya akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduknya, baik itu disebabkan oleh jumlah kelahiran maupun adanya migrasi besar besaran (Adiputra & Ria Septiani, 2015). Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama dari sektor pertanian, perdagangan, serta pertambangan minyak dan gas bumi. Sektor migas memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro, sehingga kondisi ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro (2026), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro selama periode 2011–2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, dimana pada beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang tinggi, namun pada tahun lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro belum stabil dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan fenomena fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Jawa Timur, dan Kabupaten Bojonegoro, serta pentingnya peran Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, human capital, dan konsumsi rumah tangga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Bojonegoro sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Bojonegoro



Sumber: BPS Bojonegoro (2026)

Berdasarkan data perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro 5 tahun terakhir pada tahun 2021 menurun lebih dalam menjadi -5,54%, dan tahun 2022 sebesar -6,16%. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi daerah yang dapat dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi nasional maupun dampak pandemi terhadap sektor-sektor ekonomi utama. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami pemulihan dengan nilai sebesar 2,47%, kemudian pada tahun 2024 sebesar 1,67%, dan meningkat lagi pada tahun 2025 menjadi 5,32%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro mulai membaik dan aktivitas ekonomi daerah kembali tumbuh secara positif. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan menjelaskan mengenai bagaimana faktor faktor tersebut

dapat mempengaruhi terjadinya proses pertumbuhan (Todi et al., 2025). Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama penduduk selalu bertambah Bertambahnya jumlah penduduk berarti angkatan kerja juga selalu bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil dari pada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan pemerataan ekonomi (*economic stability*) melalui retribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Spand & Rauf, 2024).

Bojonegoro ialah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur. Berdasarkan letak geografis, pada sisi utara kabupaten Bojonegoromemiliki batas wilayah dengan kabupaten Tuban. Lalu, kabupaten Nganjuk, Madiun dan Jombang pada bagian sebelah Selatan. Sedangkan, kabupaten Blora dan Ngawi pada bagianbarat, dan kabupaten Lamongan pada bagian timur. Kabupaten Bojonegoro mempunyai luas wilayah sebanyak 230.706 hektare dengan memiliki sebanyak 28 kecamatan yang meliputi 11 kelurahan & 419 desa. Pada luasnya wilayah tersebut, kondisi topografi wilayah Bojonegoro di dominasi oleh kondisi tanah yang berbukit-bukit dengan memiliki pegunungan kapur yang terdapat dibagian sebelah utara dan Selatan. Namun, pada pertengahan bagian utara dan Selatan tersebut, terdapat wilayah yang memiliki tanah yang subur untuk pertanian di dataran yang rendah. Maka, dengan kondisi tersebut membuat sektor pertanian menjadi salah satu komoditas yang berada di Bojonegoro. Selain itu, Bojonegoro juga memiliki hasil

alam berupa minyak & gas. Selain itu, Bojonegoro juga menjadi salah satu kabupaten yang menjadi penyumbang hasil minyak dan gas di Indonesia. Menurut data Pemkab Bojonegoro (2020) menjelaskan bahwa terdapat sebesar 25 % cadangan minyak nasional yang berada di kabupaten Bojonegoro. Besarnya hasil minyak dan gas di Bojonegoro tersebut tidak hanya berasal dari 1 titik sumber saja, melainkan terdapat beberapa tempat sumber minyak dan gas di Bojonegoro yang meliputi lapangan Kedung Keris dan Banyu Urip yang dikelola oleh Exxon Mobil, lapangan Sukowati yang dioperasikan oleh pihak Pertamina Asset IV, wilayah kecamatan Ngraho dan Margomulyo. Serta, lapangan Jambaran-Tiung Biru yang dioperasikan oleh pihak Pertamina EP Cepu (Falaq & Riko Setya Wijaya, 2024)

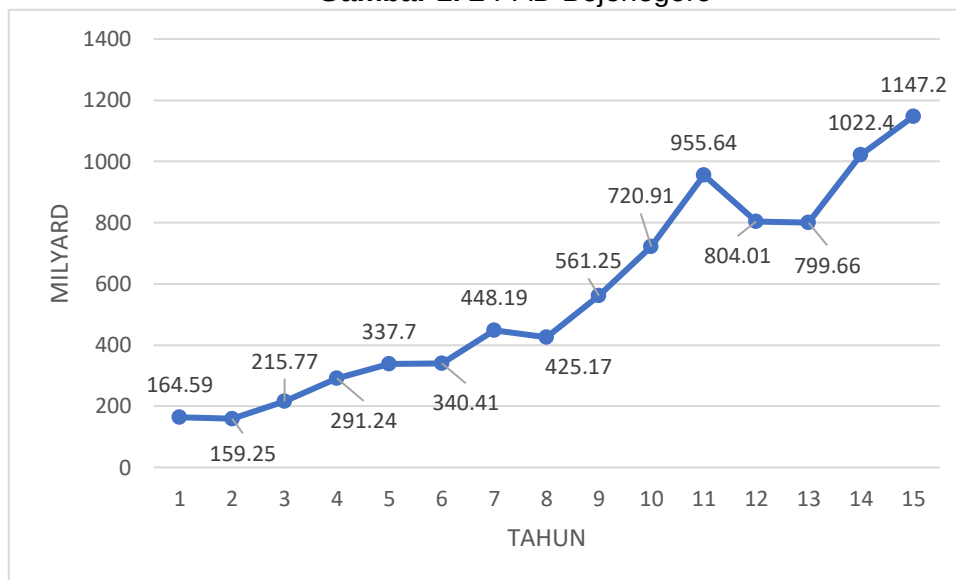
Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Mutsalisah et al., 2023). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan daerah yang menjadi indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai, sehingga dapat meningkatkan belanja modal (Azzahra et al., 2025). Jadi, apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin tinggi, maka semakin tinggi pula peluang bagi pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola dana transfer dari pemerintah pusat, serta menyusun strategi pengeluaran daerah. Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran PAD, dana transfer, dan belanja modal menjadi elemen krusial yang saling berkaitan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemandirian fiskal suatu daerah semakin meningkat seiring dengan kemampuan PAD dalam mendanai kegiatan pembangunan tanpa ketergantungan berlebih terhadap dana dari pemerintah pusat (Nurmala et al., 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mempunyai peran penting sebagai sumber dana pembangunan yang berasal dari potensi setempat, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil. PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan untuk mendanai program pembangunan, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja. Pengelolaan PAD yang baik dapat memberikan dampak besar pada pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal (W. Siregar et al., 2025). Sebagai bagian dari PAD, pajak daerah menjadi instrumen fiskal yang penting. Pajak daerah yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Tantangan seperti tingkat kepatuhan pajak yang rendah dan kurang optimalnya pengelolaan pajak daerah sering kali menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan pendapatan yang dikumpulkan daerah melalui ketentuan yang ditetapkan sendiri dalam peraturan daerah. PAD mencerminkan kemampuan dan kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. Sumber PAD mencakup berbagai penerimaan seperti pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lain yang berasal dari aktivitas ekonomi di wilayah tersebut (Sindi

et al., 2025). Secara teoretis, PAD memiliki mekanisme cara yang jelas untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD meningkatkan kemampuan belanja daerah karena pemerintah memiliki anggaran yang lebih besar untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program penting lainnya.

Gambar 1. 2 PAD Bojonegoro



Sumber: PortalAPBD Bojonegoro (2026)

Berdasarkan gambar 1.2 menjelaskan mengenai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten bojonegoro pada 5 tahun terakhir 2021 menunjukkan peningkatan PAD yang sangat pesat. Pada tahun 2021 mencapai 955,64 peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin optimal dalam mengelola potensi ekonomi daerah serta meningkatkan penerimaan daerah. Pada tahun 2022 dan 2023 PAD kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 804,01 dan 799,66. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2024 PAD kembali meningkat cukup tinggi menjadi 1022,4, bahkan pada tahun 2025 mencapai nilai tertinggi sebesar 1147,2. Rendahnya capaian PAD ini tidak hanya menunjukkan lemahnya basis ekonomi daerah,

tetapi juga mengindikasikan adanya kendala kelembagaan seperti efektivitas pemungutan pajak, pendataan wajib pajak, integrasi data fiskal, serta pengelolaan aset yang belum optimal (Rerung et al., 2025). Faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah diantaranya adalah potensi yang ada di daerah kinerja pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah. Indonesia merupakan negara hukum yang segala tindakan harus berlandaskan berdasarkan hukum yang berlaku begitupun mengenai PAD, Dana Pusat dan APBD. Kebijakan yang mengatur ketiga hal ini terdapat pada Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang menjadi Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan tentang landasan yang menjadi latar belakang mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah (Andriyani et al., 2025).

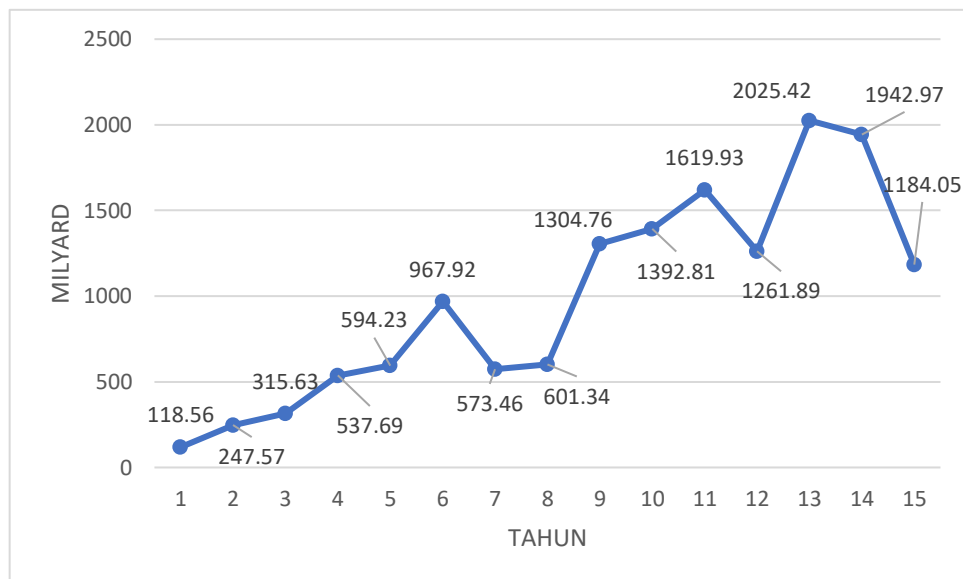
Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan sebagai sumber utama dari pendapatan daerah yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan otonomi daerah, seperti melakukan pembangunan yang akan menguntungkan bagi masyarakat setempat. Pertumbuhan pendapatan daerah sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya

yang ada dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Chasanah & Handayani, 2025)

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan (Widya Anggrainia, Nurlailib, 2026). Belanja modal adalah pengeluaran dari dana dari anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Jenis belanja modal termasuk pembelian tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud. Pencatatan dan pelaporan belanja modal adalah proses penting dalam akuntansi pemerintahan yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan memastikan transparansi pengelolaan keuangan (Tumboimbela et al., 2025).

Kendali belanja modal memiliki peran strategis, data Kementerian Keuangan (2024) menunjukkan bahwa proporsinya dalam APBD masih stagnan di kisaran 15–20% dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut, mengingat tidak semua daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meskipun alokasi belanja modal secara nominal meningkat (Haryati et al., 2025). Dalam perspektif teori ekonomi publik dan teori pertumbuhan endogen, belanja modal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas produksi daerah. Belanja modal mampu menurunkan biaya transaksi, memperbaiki konektivitas

antarwilayah, menciptakan lingkungan usaha yang lebih stabil, serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi (Sindi & Kartika Berliani, 2025). Secara keseluruhan, belanja modal merupakan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah yang tidak hanya menyediakan infrastruktur fisik, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas produksi, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Penurunan pelaksanaan belanja modal ini berdampak besar pada hasil keuangan pemerintah lokal. Infrastruktur yang tidak memadai akibat penurunan belanja modal bisa menghalangi aktivitas ekonomi dan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD). Ketidakmampuan daerah dalam melaksanakan belanja modal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga terpengaruh karena terbatasnya dana yang ada untuk melibatkan mereka secara aktif. Masyarakat yang seharusnya dapat berperan sebagai pengawas dan pelaku dalam pembangunan menjadi terbatas dalam ikut serta. Namun, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dilakukan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana (Fadilah, 2025).

Gambar 1. 3 Belanja Modal Bojonegoro

Sumber: PortalAPBD Bojonegoro (2026)

Berdasarkan gambar 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa Belanja Modal kabupaten bojonegoro realisasi belanja modal dikabupaten bojonegoro 2021-2025. Pada tahun 2021 menjadi 1619,93. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin aktif dalam meningkatkan investasi pembangunan daerah melalui pengeluaran modal. Pada tahun 2022 belanja modal mengalami penurunan menjadi 1261,89, tetapi kembali meningkat sangat tinggi pada tahun 2023 hingga mencapai 2025,42, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Tahun 2024 sedikit menurun menjadi 1942,97, dan kembali turun pada tahun 2025 menjadi 1184,05. Walaupun mengalami penurunan pada akhir periode, nilai belanja modal tersebut masih relatif tinggi dibandingkan tahun-tahun awal penelitian. Belanja modal diyakini mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian khususnya dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses layanan publik. Belanja modal yang alokasinya efektif dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mampu meningkatkan kapasitas produktif

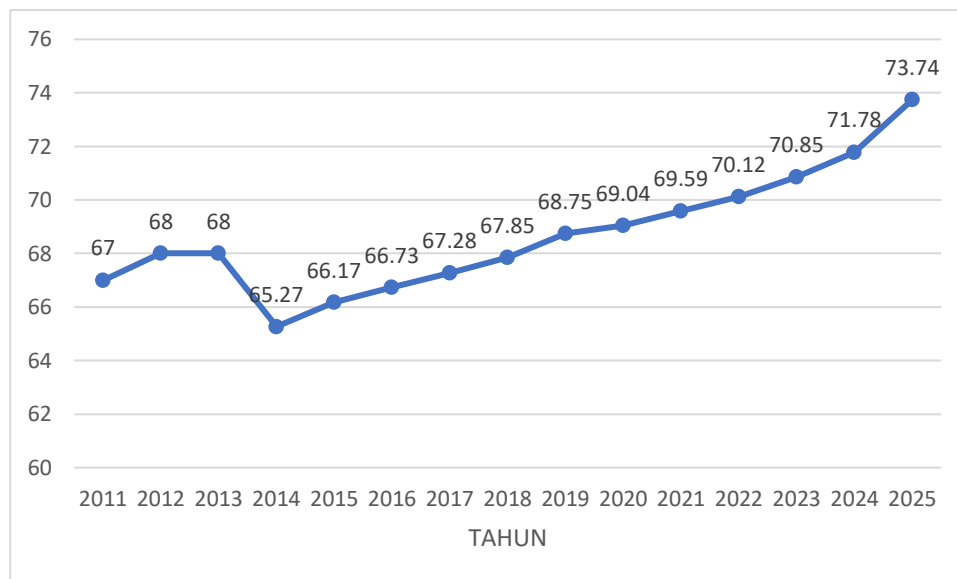
suatu wilayah yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Menurut Rahmadi, (2025) belanja modal digunakan untuk menambah asset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Tujuan dari belanja modal adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa PAD dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumber daya daerah saat ini dapat menghasilkan PAD sebagai sumber pendanaan. PAD yang sah seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan aset menghasilkan PAD (Anjani et al., 2023) .

Human capital adalah kumpulan dari berbagai kemampuan, prestasi akademik, keahlian, dan pengetahuan yang dikumpulkan dan dikuasai oleh individu untuk memaksimalkan potensi kerja mereka. Ketersediaan tenaga kerja yang sehat, terdidik dengan baik, dan memiliki produktivitas tinggi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan ekonomi di masa depan. peran human capital bukan hanya sebagai faktor penentu utama bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan (Hani et al., 2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kerap dianggap sebagai indikator yang berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan karena menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak.

Secara teori, peningkatan IPM seharusnya dapat mengurangi kemiskinan dengan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dalam pembangunan, di mana pendidikan berperan sebagai fondasi untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan, sedangkan kesehatan menjadi landasan bagi kesejahteraan seseorang. Konsep modal manusia menekankan pentingnya penguasaan keterampilan dan akses pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup, sekaligus menjadi strategi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan (Erfiana et al., 2025).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Peningkatan IPM menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. IPM yang tinggi menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang baik, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Regina et al., 2025). Salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup kualitas fisik dan nonfisik penduduk, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan indikator ekonomi (Ramdani et al., 2025). IPM mencakup empat indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata pembangunan manusia, yaitu angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan ketahanan ekonomi yang diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan nilai rupiah (Rp) (Way et al., 2025).

Gambar 1. 4 Human Capital (IPM) Bojonegoro

Sumber: BPS Bojonegoro (2026)

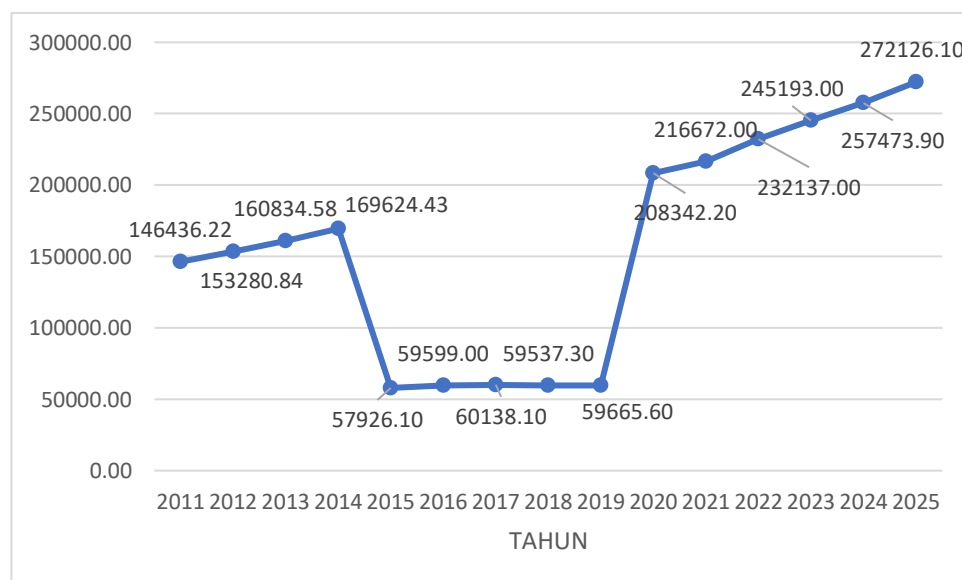
Berdasarkan gambar 1.4 diatas dapat dijelaskan bahwa IPM kabupaten bojonegoro 5 tahun terakhir tahun 2021 mencapai 69,59. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bojonegoro semakin berkembang secara konsisten. Peningkatan human capital semakin terlihat pada periode 2022–2025. Tahun 2022 nilainya mencapai 70,12, kemudian meningkat menjadi 70,85 pada tahun 2023, 71,78 pada tahun 2024, dan mencapai nilai tertinggi sebesar 73,74 pada tahun 2025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro mengalami kemajuan yang cukup baik dari waktu ke waktu. IPM berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu di maksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktorfaktor produksi yang ada. Selain dari pada itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi (Way et al., 2025).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan mutu sumber daya manusia, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan orang untuk memanfaatkan serta mengatur sumber daya pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat pembangunan manusia yang optimal. Dengan demikian, mutu sumber daya manusia bukan hanya faktor pendukung, melainkan penentu utama dalam proses pembangunan. Pengembangan kelembagaan dan teknologi merupakan fasilitas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Lyrra & Kurniati, 2025). Secara teoritis, model Solow-Swan menekankan pentingnya akumulasi modal dan kapasitas fiskal, sementara teori pertumbuhan endogen menempatkan modal manusia (IPM) sebagai mesin utama pertumbuhan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya melihat dari infrastrukturnya dan belum tentu masyarakat didalamnya sudah terjamin kesejahteraan sosialnya (Rahcman & Bustamam, 2025). IPM merupakan indikator komposit yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Konsumsi rumah tangga bisa diartikan sebagai pengeluaran oleh rumah tangga atau masyarakat umum yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam periode tertentu. Konsumsi rumah tangga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah juga berpengaruh dan berkontribusi terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendapatkan barang dan jasa termasuk pengeluaran untuk membayar gaji pegawai pemerintah (Purnomo, 2025).

Menurut Ridha et al., (2025) Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan ekonomi. Dalam kerangka teori ekonomi makro, pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana dijelaskan oleh Keynes (1936) melalui fungsi konsumsi, yang menekankan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga akan diikuti oleh peningkatan konsumsi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori permintaan agregat, peningkatan konsumsi akan memacu pertumbuhan output melalui mekanisme multiplier effect. Oleh karena itu, perubahan dalam tingkat konsumsi rumah tangga dapat secara langsung memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Permana & Puspitaningsih, 2025).

Gambar 1. 5 Konsumsi Rumah Tangga Bojonegoro



Sumber: BPS bojonegoro (2026)

Berdasarkan gambar 1.5 diatas dapat dijelaskan bahwa Konsumsi Rumah Tangga kabupaten bojonegoro 5 tahun terakhir pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 21.667.200, tahun 2022 sebesar 23.213.700, dan tahun

2023 mencapai 24.519.300. Selanjutnya pada tahun 2024 meningkat menjadi 25.747.390, dan tahun 2025 mencapai nilai tertinggi sebesar 27.212.610. Konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas ini memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, di mana ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya pun cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan menurun, maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan mengalami penurunan (Permana & Puspitaningsih, 2025). Konsumsi rumah tangga menunjukkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan merupakan komponen utama permintaan agregat. Konsumsi rumah tangga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dihabiskan individu atau keluarga untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan tersier (Lubis & Suhariato, 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, human capital (IPM), dan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan inkonsistensi antar wilayah dan periode penelitian. Studi oleh (Nurmala et al., (2025) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, efektivitas belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi masih diperdebatkan, sebagaimana dijelaskan oleh (Juli et al., (2025), yang menekankan pentingnya aspek efisiensi. Sebagaimana dijelaskan oleh (Utami, 2024) menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menandakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli berperan penting dalam mendorong

produktivitas regional. Studi oleh (Permana & Puspitaningsih, (2025) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan belanja masyarakat menjadi motor utama aktivitas ekonomi daerah. Implikasinya, kebijakan publik perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi lokal guna menjaga momentum pertumbuhan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan data panel tingkat provinsi dan belum banyak yang mengkaji secara spesifik konteks kabupaten dengan karakteristik ekonomi berbasis migas dan fluktuasi fiskal tinggi seperti Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian research gap baik secara empiris, kontekstual, maupun metodologis yang membuka ruang untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh PAD, belanja modal, IPM, dan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro periode 2011–2025 menggunakan pendekatan time series.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis pertumbuhan ekonomi di kabupaten bojonegoro tahun 2011-2025”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011–2025?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011–2025?

3. Apakah *Human Capital* (Indeks Pembangunan Manusia/IPM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011–2025?
4. Apakah Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011–2025?
5. Apakah PAD, Belanja Modal, *Human Capital* (IPM), dan Konsumsi Rumah Tangga secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011–2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011–2025.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Human Capital* (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011–2025.
4. Untuk menganalisis pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011–2025.
5. Untuk menganalisis pengaruh PAD, Belanja Modal, *Human Capital* (IPM), dan Konsumsi Rumah Tangga secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan teori

pertumbuhan ekonomi daerah, teori fiskal daerah, teori pertumbuhan endogen, dan peran *human capital* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

Sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam optimalisasi PAD, alokasi belanja modal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan Konsumsi rumah tangga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Bagi Akademisi

Sebagai referensi dan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, *Human Capital* (IPM), dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Data yang digunakan adalah data sekunder time series periode tahun 2011–2025.
3. Objek penelitian hanya terbatas pada Kabupaten Bojonegoro.

4. Indikator pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
5. Penelitian ini tidak membahas faktor lain di luar variabel yang diteliti seperti investasi swasta, inflasi, tenaga kerja, atau variabel makro ekonomi lainnya.